



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA KINERJA
TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSTAM EFFENDI

Jabatan : Walikota Jakarta Barat Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

Jabatan : Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2020

PIHAK KEDUA,

Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

PIHAK PERTAMA,

Walikota Jakarta Barat Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

RUSTAM EFFENDI
NIP 196010131983121001

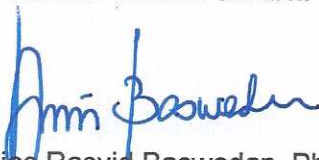
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Barat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	86
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Barat	8,797,819,537	APBD Provinsi DKI Jakarta
2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	75,124,451,124	APBD Provinsi DKI Jakarta
3	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Barat	383,468,853,275	APBD Provinsi DKI Jakarta
4	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	3,339,053,121	APBD Provinsi DKI Jakarta
5	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	228,869,037,869	APBD Provinsi DKI Jakarta

Jakarta, 31 Januari 2020

Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta


Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Walikota Kota Administrasi
Jakarta Barat Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta


Rustam Effendi
NIP 196010131983121001

RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Nama : Rustam Effendi
NIP : 196010131983121001
Jabatan : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta
Unit Kerja : Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Barat	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	e-SAKIP	Nilai Kota : agregat IKM Kecamatan. Kecamatan : agregat IKM Kelurahan. Kelurahan : survei kepuasan masyarakat pada kegiatan posyandu, PKK, PPSU, Jumantik, Ketertiban Umum dan RPTRA/Taman Maju Bersama	N/A	N/A	N/A	86	86	Indeks
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran diukur dari 3 Komponen yaitu: a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi belanja barang, belanja modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu belanja barang dan belanja modal yang telah ditetapkan di lingkungan perangkat daerah b. Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai. apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. hasil lebih sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk kegiatan /belanja lainnya c. pencapaian output : output belanja adalah output yang terdapat pada DPA perangkat daerah. realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran. formulasi pengukuran adalah sebagai berikut: capaian = (penyerapan anggaran X 40%) + (efisiensi X 10%) + (pencapaian output X 50%)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
3	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun (nomor 9)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun (nomor 9)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
4	Meningkatnya kewirausahaan baru	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
5	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (nomor 38)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (nomor 38)	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
7	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	100%	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor(61)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63) nomor (63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
9	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan (nomor 66) nomor (66)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan (nomor 66)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
10	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73) nomor (73)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	100%	100%	100%	N/A	100%	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Khusus											
11	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	1	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	e-Kinerja	Jumlah realisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III dan/atau IV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Paket
12	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	5%	10%	20%	30%	30%	Persentase
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	3	N/A	N/A	3	WTP
14	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	a) Persentase penyusunan communication plan (strategi komunikasi) program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per tahun sesuai dengan PD masing-masing pada bulan April 2020. *Template communication plan mencakup minimal : Identifikasi masalah, Tujuan, Pesan Utama, Target Audience, Rencana Kegiatan dan Editorial plan *Verifikasi communication plan dilakukan oleh Asisten dibantu Diskominfotik. b) Persentase penyusunan calendar of events dan communication tools standard untuk program umum dan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per triwulan sesuai dengan PD masing-masing. Diskominfotik menyusun calendar of events dan communication tools standard di level Provinsi. c) Persentase penyusunan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis sesuai SOP yang disusun Diskominfotik per triwulan . d) Persentase penyusunan bahan paparan Rapat Koordinasi Komunikasi Publik per bulan dan di Validasi oleh Tim Komunikasi yang dipimpin oleh Asisten.	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Operasional											
15	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
16	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
17	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei	80%	80%	85%	90%	90%	Persentase
18	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.

Jakarta, 31 Januari 2020
Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi DKI Jakarta,



Rustam Effendi
NIP 196010131983121001